

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Implementasi Program Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk program yang dibuat guna memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika agar menghilangkan efek candu pemakaian narkotika, sehingga dapat menekan angka ketergantungan yang dihasilkan ketika menggunakan narkotika.

Selain itu dalam melaksanakan program rehabilitasi ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Hal ini menjelaskan tentang bagaimana cara pelaksanaan teknis wajib laport pecandu narkotika.

Berdasarkan hasil temuan dan observasi peneliti telah lakukan terkait program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh BNNP Sumatera Barat telah berjalan namun belum sepenuhnya berhasil dan maksimal karena masih ditemukan bebrapa kendala dan masalah di beberapa variabel tertentu. Melalui model pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn maka peneliti dimungkinkan untuk menganalisa dan menggambarkan sebuah implementasi kebijakan, dimana akan ditemui bagaimana jalannya pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil kebijakan.

### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Secara umum Program Layanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP di Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, ini ditandai dengan sebagian besar pegawai dan staff yang bekerja di BNNP Sumatera Barat sudah mengetahui dari bagaimana layanan program dan aturan yang berlaku tentang rehabilitasi penyalahguna narkotika. Sedangkan indikator kejelasan bagi kelompok sasaran masih belum sepenuhnya berhasil karena masih banyaknya kelompok sasaran dalam hal ini pasien rehabilitasi Narkotika belum mengetahui tentang adanya rehabilitasi yang dilakukan untuk penyalahguna narkotika.

### 2. Sumber Daya

Peneliti memiliki kesimpulan bahwa secara keseluruhan variabel sumber daya yang dimiliki oleh BNNP Sumatera Barat belum sepenuhnya mencukupi dalam mendukung pelaksanaan program layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Sumatera Barat khususnya sumber daya non manusia yang berupa dukungan dari fasilitas pendukung.

### 3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi yang dilakukan belum optimal, terkait dengan intensitas koordinasi perlu ditingkatkan dan terkait dengan konsistensi jadwalnya perlu diatur dan dibicarakan kembali, ketiadaan jadwal yang jelas ini akan menghambat konsistensi komunikasi dan koordinasi dalam upaya dan kegiatan-kegiatan bersama yang telah di rancang, oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat,

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, bersama dengan BNNP Sumatera Barat.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

BNNP Sumbar sebagai implemendor pelaksanaan program layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Sumatera Barat telah memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien dimana rentang kendali yang dimiliki tidak terlalu panjang sehingga memudahkan penyampai informasi dan arahan yang dilakukan oleh Kepala Badan secara cepat.

#### 5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Implementasi Program Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Sumatera Barat diketahui bahwa disposisi implemendor yang terjadi sudah baik dimana implemendor sangat mendukung dengan dijalankannya peraturan ini, selain itu pemahaman implemendor sendiri terhadap peraturan pemerintah ini sudah sangat baik.

### 1.2. Saran

Dalam memperbaiki kinerja pada program layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkoba oleh BNNP Sumatera Barat, peneliti mengemukakan saran untuk BNNP Sumatera Barat maupun Pemerintah Daerah Sumatera Barat antara lain :

1. Melakukan sosialisasi dengan maksimal yang bertujuan untuk masyarakat secara luas mengetahui tentang adanya program rehabilitasi ini, sehingga

ketika masyarakat yang akan meminta layanan rehabilitasi narkoba dapat dengan mudah mengakses layanan tersebut.

2. Menambahkan fasilitas pendukung guna terwujudnya layanan yang maksimal bagi penyalahguna narkoba. Fasilitas pendukung sangat penting membrikan dukungan pelaksanaan program. Apabila dilengkapi dengan fasilitas penukung maka tugas dari petugas rehabilitasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Memperbaiki hubungan antar lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Dengan adanya hubungan yang kontiniyu maka seluruh lembaga terkait dapat bersinergi dengan baik guna memaksimalkan proses implementasi program.
4. Memperhatikan kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik untuk menunjang program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Hal ini bida menggunakan cara bersosialisasi dengan baik akan pentingnya bahaya narkoba ditengah masyarakat. Selain itu dukungan penuh pejabat Pemerintah sangat diperlukan agar kedepan program rehabilitasi memang menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.